

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia memiliki aturan, kebijakan, dan undang-undang yang lengkap terkait pendidikan. Namun, dalam pelaksanaan yang tidak konsisten dan ketidaksesuaian dengan ketentuan sering terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah kelemahan dalam pelaksanaan oleh para pelaku atau pelaksana. Beberapa pihak yang berkepentingan, seperti individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu, mungkin tidak memprioritaskan pendidikan yang berkualitas. Mereka mungkin hanya fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan arah pendidikan lebih berorientasi pada kuantitas, seperti jumlah lulusan atau tingkat kelulusan, daripada pada kualitas pendidikan itu sendiri (Muhardi, 2004).

Pendidikan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa, "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*". Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya akses jalan yang memadai bagi masyarakat agar mereka dapat mengenyam pendidikan secara maksimal. Menurut Misya (2014) Pendidikan yang berkualitas harus diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan, akan tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan memiliki peran yang tak terpisahkan dalam perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan mereka untuk berperan dalam masyarakat. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat, minat, dan kecerdasannya. Pembangunan pendidikan memiliki posisi penting dalam

masyarakat pedesaan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkomitmen dalam memprioritaskan pembangunan pendidikan. Dengan menganggap pendidikan sebagai investasi jangka panjang, kita dapat mencapai pembangunan manusia yang lebih baik dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara (Sihombing, 2016).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional di Indonesia. Desa memiliki otonomi atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku di daerah kabupaten. Sebagai ujung tombak pembangunan, desa memiliki peran yang penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Desa bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan tugas-tugas pembantuan. Penting bagi desa untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten, sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat desa (Suryadi, 2020).

Menurut Imron (2018) desa membutuhkan pendidikan sebagai wadah dalam membangun manusia yang bermartabat dan berperan aktif dalam menciptakan generasi yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dapat dikembangkan. Aparatur pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pendidikan di desa dan sebagai penggagas masyarakat yang peduli terhadap pendidikan anak. Pemerintah desa bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin suatu daerah, tetapi juga sebagai pendukung pendidikan di desa. Dalam keseluruhan, peran pemerintah desa sebagai pelayan dan penghubung masyarakat sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Melalui komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, pendidikan di desa dapat terus berkembang dan

memberikan manfaat bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal.

Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam memberikan akses yang mudah bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, seperti sekolah dan transportasi menuju sekolah. Pemerintah desa juga dapat berupaya untuk menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di daerah terdekat. Sebagai desa yang jauh dari pusat kota, hingga saat ini Desa Karangpatihan masih banyak yang mengalami berbagai permasalahan salahsatunya masalah pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat desa Karangpatihan berada dalam tingkat ekonomi rendah. Dimana masyarakat belum bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Desa telah berupaya keras dalam membantu pendidikan untuk masyarakatnya. Dimana pemerintah memberikan program beasiswa Karangpatihan *Smart*. Menurut Surya (2015) beasiswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemberian beasiswa merupakan wujud dari kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Karangpatihan. Melalui kegiatan pemberian beasiswa, pemerintah desa dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Beasiswa dapat membantu mengatasi sebagian masalah kemiskinan dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.

Program beasiswa Karangpatihan Smart yang dilakukan sejak tahun 2017. Dimana program beasiswa ini ada 4% yang mengikuti dari sekian banyak pelajar atau mahasiswa yang ada di Desa Karangpatihan. Beasiswa ini memiliki tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi secara gratis. Dalam penerapannya pemerintah desa telah memberikan informasi tersebut melalui media sosial seperti *instragram*, *facebook*. Untuk memperoleh

Beasiswa *Smart*, warga desa yang terlibat untuk dapat mengusulkan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan kepada ketua RT, lalu ketua RT tersebut menyampaikan kepada Pemerintah Desa untuk diverifikasi dan diputuskan melalui musyawarah desa. Program beasiswa ini merupakan kerjasama Pemerintah Desa Karangpatihan dengan lembaga sekolah dan berbagai kampus yang ada di Ponorogo. Program beasiswa yang dilakukan di desa Karangpatihan setiap tahunnya merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam pelaksanaan program beasiswa, kepala desa Karangpatihan memberikan bantuan berupa dana kepada penerima beasiswa. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah atau kuliah, seperti biaya pendaftaran, uang kuliah, buku, seragam, dan keperluan pendidikan lainnya. Selain itu, kepala desa juga ada kerjasama antara pihak sekolah dan kampus. Sumber dana program beasiswa berasal dari beberapa sumber, antara lain dana Desa, donatur, ada juga kerjasama pihak sekolah, kampus, dan yayasan.

Bagian selanjutnya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Disini telah mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian.

Penelitian pertama milik Nurazizah Syarif (2020) dengan judul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur*. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam mengurai data secara deskriptif.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa merupakan langkah yang menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Luwu Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten tersebut. Kebijakan ini memberikan bantuan yang signifikan bagi masyarakat

dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan telah terbukti berhasil dalam meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dan jumlah penerima beasiswa yang terus meningkat. Namun, meskipun kebijakan ini memberikan manfaat yang nyata, terdapat beberapa kekurangan yang perlu di perhatikan. Salah satu kekurangan adalah ketidaktepatan sasaran pemberian beasiswa, terutama dalam hal pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu.

Penelitian kedua milik Yohanes Rolison Moang Poar, dkk (2021) berjudul *Peran Pemerintah Desa Terhadap Tingkat Prestasi Belajar Siswa di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah desa terhadap tingkat prestasi belajar siswa, mengetahui implementasi peraturan tentang pemerintah desa terhadap tingkat prestasi belajar siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah desa dalam meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa di Desa Bola sangat penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan baik secara formal maupun nonformal di wilayah mereka. Implementasi peraturan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa antara lain Pembangunan pemberdayaan sumber daya manusia dibidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan honor tutor PAUD dan dukungan pendidikan bagi siswa miskin ataupun berprestasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Penelitian ketiga milik Dahlena Dewi Fitri (2017) berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam Sektor Pendidikan : (Bantuan Beasiswa terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2016)*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah daerah dalam sektor pendidikan (bantuan beasiswa terhadap masyarakat kurang

mampu di kabupaten Kuantan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masalah anggaran yang kurang memadai untuk bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di tingkat universitas merupakan isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Fluktuasi atau penurunan anggaran setiap tahun dapat menghambat upaya meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang membutuhkan. Peran pemerintah berdasarkan survey diketahui bahwa dalam penyaluran bantuan beasiswa masih banyak ditemukan kecurangan dan pendampingan yang tidak tepat sasaran terutama dalam hal pengawasan dan pemilihan penerimaan.

Penelitian keempat milik Andi Bahrum Syam (2017) berjudul *Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Menekan Angka Putus Sekolah di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Menekan Angka Putus Sekolah di Desa Batulappa dan faktor-faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batuappa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemerintah desa memiliki peran penting dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator pada dasarnya sudah cenderung efektif, terlihat bahwa peran pemerintah desa telah berdampak positif dengan adanya penurunan angka putus sekolah. Beberapa faktor yang telah mempengaruhi penurunan angka putus sekolah tersebut disebabkan adanya kepedulian pemerintah desa terhadap pendidikan, peran orang tua, dan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa yakni pengaruh sesama teman sepergaulan atau sepermainan anak, faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan kondisi fisik juga dapat mempengaruhi keputusan putus sekolah.

Penelitian kelima milik Noorizal, dkk (2022) berjudul *Peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Pendidikan Tinggi (Studi Bantuan Pendidikan Mahasiswa)*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam pendidikan tinggi (studi bantuan pendidikan mahasiswa). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

dari jumlah siswa di Kabupaten Bintan sebanyak 138 orang, namun hanya 48 siswa dari Kabupaten Bintan yang menerima bantuan pada gelombang pertama yang belajar di luar Kepulauan Riau mendapat bantuan. Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan masa depan dan generasi penerus bangsa di Kabupaten Bintan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami hambatan ekonomi melalui program bantuan pendidikan yang secara ekonomi terhambat untuk belajar melalui bantuan Pendidikan. Dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik, amanah, bertanggung jawab, dan bersih, konsep ketimpangan (equality) sangat relevan. Pemerintah daerah harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakatnya, termasuk di dalamnya kesenjangan dalam akses pendidikan. Dengan menerapkan konsep ketimpangan, pemerintah dapat menyediakan bantuan sosial atau bantuan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diapahami bahwa, pertama, implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa merupakan langkah yang menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam meningkatkan Pendidikan dan dan sumber daya manusia. Akan tetapi, kebijakan ini masih memiliki kekurangan yaitu ketidaktepatan sasaran pemberian beasiswanya khususnya pada beasiswa masyarakat kurang mampu. Kedua, peran pemerintah desa dalam meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa di Desa Bola sangat penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan baik secara formal maupun nonformal di wilayah mereka. Ketiga, masalah anggaran yang kurang memadai untuk bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di tingkat universitas hal ini dikarenakan fluktuasi atau penurunan anggaran setiap tahun. Keempat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator pada dasarnya sudah cenderung efektif. Akan tetapi ada beberapa faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa

Batulappa yakni pengaruh sesama teman sepergaulan atau sepermainan anak, faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan kondisi fisik juga dapat mempengaruhi keputusan putus sekolah. Kelima, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami hambatan ekonomi melalui program bantuan pendidikan yang secara ekonomi terhambat untuk belajar melalui bantuan pendidikan.

Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik yaitu mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui beasiswa Smart di Desa Karangpatihan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dapat menjadi kerangka konseptual yang relevan dalam memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga sekolah, dan kampus berkontribusi dalam pelaksanaan program beasiswa tersebut. Melalui program beasiswa Smart, pemerintah desa Karangpatihan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Pendekatan *Collaborative Governance* mencakup berbagai aspek seperti komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat, pembagian peran dan tanggung jawab, serta adanya sinergi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada konteks yaitu strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui beasiswa Smart di Desa Karangpatihan. Penekanan pada kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini dapat melibatkan analisis yang lebih mendalam mengenai strategi yang telah dilakukan, dampak yang telah dicapai, serta evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi program.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari identifikasi masalah yang ada, sehingga dapat dirumuskan yakni, “Bagaimana strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui beasiswa smart di Desa Karangpatihan?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui beasiswa smart di Desa Karangpatihan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui program beasiswa smart. Selain itu, untuk universitas dan institusi pendidikan dapat memperoleh pemahaman atau ilmu pengetahuan yang baru tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program beasiswa smart.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan informasi yang relevan dan mendalam terhadap pembaca mengenai strategi pemerintah desa Karangpatihan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui program beasiswa smart.
- Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang telah membutuhkan, terutama untuk penelitian selanjutnya.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan bagi pihak penulis dan pihak pembaca.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Strategi

Strategi merupakan suatu seni dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi dan dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Strategi yang efektif dalam artian mampu beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dengan beradaptasi antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya, strategi dapat lebih realistis dan terarah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi, strategi yang

adaptif juga memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat (Giswanti, 2018).

2. Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai pemerintahan desa di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “*Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Dalam pemerintahan desa, terdapat kepala desa dan perangkat desa.

3. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kemampuan, kepuasan, dan hasil yang diharapkan dari sistem pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek internal dan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, penting bagi sistem pendidikan untuk fokus pada peningkatan input, proses, dan output secara seimbang. Diperlukan upaya yang komprehensif dalam pengembangan kurikulum yang relevan, adanya sarana prasarana yang memadai, pelatihan guru yang baik (Syukri et al., 2019).

4. Beasiswa Smart

Beasiswa Smart merupakan program bantuan yang bertujuan untuk membantu individu, terutama mereka yang sedang menjalani pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan lebih baik. Bantuan ini berupa dana yang ditujukan untuk membantu menutupi biaya pendidikan atau ongkos yang harus ditanggung oleh siswa atau mahasiswa selama mereka menempuh pendidikan. Program beasiswa Smart di Desa Karangpatihan merupakan hasil dari kerjasama antara Pemerintah Desa Karangpatihan dengan lembaga sekolah dan berbagai kampus yang berada di Ponorogo. Melalui kerjasama ini, pemerintah desa dapat menyediakan bantuan finansial kepada siswa atau mahasiswa yang membutuhkan, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa terkendala

masalah biaya.

F. LANDASAN TEORI

1. Collaborative Governance

Collaborative governance adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang di luar pemerintahan atau negara. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan program publik. Kolaborasi merupakan kegiatan yang melibatkan pada pengelolaan jejaring sosial, di mana simpul-simpul komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan saling terhubung dan bekerja sama. Jejaring sosial mencerminkan hubungan antara pemangku kepentingan, seperti individu, kelompok, organisasi, atau komunitas. Pemangku kepentingan ini telah mempunyai hubungan yang saling terikat dan saling mempengaruhi dalam konteks tertentu. Dalam konteks teori kolaborasi, fokus diberikan pada analisis proses manajemen dari perspektif jaringan sosial. Ini berarti bahwa teori kolaborasi mempelajari bagaimana hubungan antara pemangku kepentingan dalam jaringan sosial mempengaruhi proses pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Model tata kelola kolaboratif mensyaratkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam dialog. Setiap pemangku kepentingan memiliki suara untuk menyuarakan kepentingan mereka sendiri dalam konteks kolaborasi. Ini berarti bahwa setiap pemangku kepentingan diakui dan dihargai sebagai aktor yang memiliki kontribusi dan kepentingan unik dalam kerangka kolaborasi (Astuti Retno, Warsono Hardi, 2020).

Dalam konsep governance, pengakuan diberikan kepada tiga domain utama institusi yang saling berinteraksi dan berperan dalam menjalankan fungsi tata kelola antara lain yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Dalam konsep governance, kerjasama antara ketiga domain ini menjadi kunci dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan program yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Pengakuan terhadap peran aktif dan

saling ketergantungan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat menjadi landasan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung partisipasi tersebut, serta mengelola sumber daya publik dengan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat penting dalam mencapai good governance (Cahya, 2020).

Dalam proses kolaborasi telah dilakukan beberapa tahapan. Penting untuk dapat melihat tahapan model kolaborasi sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Namun, proses kolaboratif tersebut sulit untuk dilakukan karena karakteristik masing-masing pemangku kepentingan berbeda. Menurut (Anshar, 2018) menguraikan Collaborative Governance ada 5 tahapan yaitu :

a. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Collaborative governance didasarkan pada dialog tatap muka secara langsung dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan membangun solusi yang berkelanjutan untuk masalah yang kompleks. Penting untuk mengakui bahwa setiap situasi atau konteks mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam bentuk komunikasi yang digunakan. Dialog langsung memungkinkan pemangku kepentingan untuk saling berinteraksi secara langsung, mengungkapkan kekhawatiran, membagikan pengetahuan, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dalam dialog tatap muka ini dilakukan secara langsung bukan hanya negosiasi yang ala kadarnya. Dialog langsung ini dapat meminimalisir antagonisme (menentang tujuan utama) dari antar stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, stakeholder ini dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kepentingan bersama.

b. *Trust building* (Membangun Kepercayaan)

Pada awal proses kolaborasi, buruknya rasa kepercayaan antara stakeholder dapat menjadi hal yang umum terjadi. Kolaborasi tidak hanya melibatkan negosiasi antara pemangku kepentingan, tetapi juga melibatkan untuk saling membangun kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam kolaborasi yang berhasil. Membangun kepercayaan antara stakeholder adalah langkah kritis dalam proses kolaborasi. membangun kepercayaan antar stakeholder harus menjadi fokus utama pada tahap awal proses kolaborasi. Mengatasi egosentrisme dan membangun pemahaman yang saling menghormati adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kolaboratif yang sukses.

c. *Commitment to process* (Komitmen terhadap Proses)

Komitmen merupakan elemen penting dalam proses kolaborasi. Komitmen menunjukkan motivasi dan keterlibatan aktif dari setiap stakeholder dalam upaya kolaborasi. Ketika semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang kuat, peluang untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan berkelanjutan meningkat, sementara risiko konflik dan kegagalan dapat diminimalisir. Meskipun komitmen dalam kolaborasi memang merupakan hal yang rumit dan penting untuk diperhatikan. Komitmen merupakan sikap atau tanggung jawab aktif dari setiap stakeholder untuk terlibat dan berkontribusi secara maksimal dalam kolaborasi. Dalam kesimpulannya, komitmen adalah faktor kunci dalam proses kolaborasi. Stakeholder harus memiliki motivasi, tanggung jawab, dan keterlibatan yang kuat dalam mencapai tujuan bersama. Dengan komitmen yang kokoh, potensi resiko dapat dikelola dengan lebih baik dan hasil kolaboratif yang sukses dapat dicapai.

d. *Share Understanding* (Pemahaman Bersama)

Seiringan dengan berlangsungnya kolaborasi, stakeholders juga harus mengembangkan persepsi yang sama. Dengan mengembangkan persepsi yang sama, stakeholder dapat menciptakan landasan yang solid

untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan mencapai hasil yang diinginkan. Persepsi yang serupa memungkinkan stakeholder untuk memiliki pandangan yang saling mendukung dan bersinergi dalam kolaborasi mereka. Penting bagi stakeholder terlibat dalam menyepakati sesuatu yang mereka capai melalui kerjasama. Membangun pemahaman bersama mengenai misi, tujuan, ideologi, atau nilai-nilai yang sama adalah kunci dalam menciptakan fondasi yang kokoh untuk kolaborasi yang sukses. Dengan hal tersebut maka akan berimplikasi dalam mencapai kesepakatan bersama dan memajukan kolaborasi dengan efektif.

e. *Intermediate outcomes* (Hasil atau Output)

Kolaborasi dapat terjadi apabila tujuan dari kolaborasi tersebut adalah dapat dicapai, untuk menciptakan momentum yang mendorong keberhasilan kolaborasi, penting bagi para stakeholder untuk mempunyai pemahaman yang jelas terkait dengan tujuan dan manfaat yang dicapai melalui kolaborasi tersebut. Hal ini membantu memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam upaya kolaboratif. Proses membangun kepercayaan dalam kolaborasi adalah kritis dan esensial. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan momentum yang dapat mendorong keberhasilan kolaborasi. *Intermediate outcomes*, atau hasil-hasil sementara, memainkan peran penting dalam memperkuat kolaborasi. *Intermediate outcomes* dapat berupa keuntungan kecil atau pencapaian-pencapaian yang terjadi selama proses kolaborasi berlangsung. Keuntungan-keuntungan ini bisa bersifat nyata dan dapat diukur secara relatif. *Intermediate outcomes* yang terjadi sepanjang waktu dapat membangun momentum dan memberikan bukti bahwa kolaborasi memberikan manfaat yang konkrit.

Menurut Sherin (2022) dalam jalannya Collaborative Governance, terdapat faktor penghambat kolaborasi. Terhambatnya suatu Collaborative Governance dapat disebabkan oleh faktor antara lain :

a. Faktor Struktur Sosial

Struktur sosial yang kuat atau dominasi dari pihak tertentu dalam kolaborasi dapat menghambat partisipasi aktor lain. Ketika institusi atau pemerintah menerapkan struktur sosial yang membatasi akses atau partisipasi aktor lain, kolaborasi dapat menjadi tidak merata atau tidak inklusif. Kesenjangan kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya juga dapat menghambat kolaborasi yang adil dan efektif.

b. Faktor Kultural atau budaya

Budaya yang tergantung pada produsen dan kurangnya keterampilan untuk inovasi dapat menghambat kolaborasi. Jika budaya organisasi atau pemangku kepentingan tidak mendorong pengambilan risiko atau terobosan baru, kolaborasi mungkin menjadi stagnan atau tidak mampu mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kolaborasi yang efektif, aparatur pemerintah perlu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan fokus pada pencapaian hasil.

c. Faktor Kepentingan Pemerintah

Faktor ini melibatkan kepentingan politik dan perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan yang terlibat. Jika pemimpin atau pemerintah tidak mampu mencapai kesepakatan yang kompleks dan saling bertentangan dalam mencapai tujuan politik, kolaborasi dapat mengalami kegagalan. Perubahan kesepakatan awal atau konflik kepentingan antara pemangku kepentingan juga dapat menghambat jalannya kolaborasi.

Dalam penelitian ini menggunakan model triple helix mengenai aktor yang terlibat didalam beasiswa smart. Menurut Al Fadhi Mursyid (2020) keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terkait erat dengan strategi, inovasi, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan juga suatu sistem untuk menyesuaikan dan mempercepat proses strategi yang ditetapkan. Salah satu konsep yang dapat digunakan dalam konteks ini adalah konsep "triple helix". Triple helix merupakan metafora untuk interaksi khusus

antara universitas, industri, dan pemerintah (negara) dimana masing-masing mempertahankan identitasnya sendiri tetapi juga dapat menggunakan kesempatan (peran) dari yang lain. Melalui penerapan konsep Triple Helix, organisasi dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang ada dalam masyarakat untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi yang efektif antara universitas, industri, dan pemerintah (negara) dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengembangan industri kreatif.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam konteks penelitian adalah penguraian atau penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah yang diterapkan dalam penelitian (Andri, 2021). Definisi operasional penelitian ini menjelaskan bagaimana institusi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat melalui beasiswa Smart.

Collaborative governance adalah pendekatan pengelolaan pemerintahan yang mengaitkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara dengan tujuan mencapai kesepakatan dan musyawarah didalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan program publik.

Sehingga penelitian ini dikerjakan oleh 3 pihak yang disebut triple helix dan diklasifikasikan pada collaborative governance yang memiliki 5 tahapan :

1. Face to face (dialog tatap muka)
2. Trust building (membangun kepercayaan)
3. Commitment to process (komitmen terhadap proses)
4. Share understanding (pemahaman bersama)
5. Intermediate outcomes (hasil atau output)

H. METODOLOGI PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2019) penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam dan detail. Jadi, temuannya bukan diperoleh dari prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan lainnya. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Landasan teori membantu peneliti memfokuskan penelitiannya dan menginterpretasikan data yang diperoleh sesuai dengan konsep dan kerangka pemikiran yang telah ada sebelumnya. Proses penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan atau narasumber. Peneliti melakukan pengamatan, wawancara, atau diskusi dengan subjek penelitian untuk memahami perspektif, pengalaman, dan tafsiran mereka terhadap fenomena yang sedang diteliti. Untuk itu peneliti ini harus dapat terlibat langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.

b. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo didasarkan pada beberapa alasan yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah dipilih. Salah satu alasan yang disebutkan adalah bahwa Desa Karangpatihan memiliki kondisi yang mendukung untuk mendapatkan data yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian dan relevansinya dengan topik yang dipilih. Pemerintah Desa telah berupaya keras dalam membantu pendidikan untuk masyarakatnya. Dimana pemerintah memberikan program beasiswa Karangpatihan *Smart*. Beasiswa tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang mempunyai keinginan melanjutkan sekolah atau kuliah agar bisa mendapatkan sekolah atau kuliah dengan gratis.

c. Informan atau subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karangpatihan yang mencakup kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur dalam

menyelenggara pemerintahan desa. Dalam hal ini program beasiswa Smart bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan sekolah atau kuliah agar dapat memperoleh beasiswa dan mendapatkan akses pendidikan secara gratis.

Penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan orang yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan terkait strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui program beasiswa Smart. Metode yang digunakan dalam menentukan informan menggunakan purposive sampling dimana merupakan sebuah teknik dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan pertama adalah kepala desa Karangpatihan, informan kedua adalah kaur keuangan ketiga RT (Rukun Tetangga) keempat kampus atau pihak sekolah dan yang kelima adalah penerima Beasiswa Karangpatihan *Smart*. Dalam hal ini program Beasiswa *Smart* sebagai program untuk bisa membantu bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai keinginan melanjutkan sekolah atau kuliah agar bisa mendapatkan sekolah atau kuliah dengan gratis. Teknik dalam penentuan informan penelitian ini berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu memiliki pengetahuan dan informasi mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui Beasiswa *Smart*. Teknik pemilihan informan merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Teknik pemilihan informan yang tepat dapat mempengaruhi hasil penelitian dan relevansi temuan dengan tujuan penelitian.

d. Metode atau Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut :

a) Metode wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan penjawab untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara

merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung, akan dilakukan para pewawancara dengan penjawab bisa di peroleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara penelitian ini menggunakan semi terstruktur, dimana wawancara dalam semi-terstruktur peneliti memiliki kerangka atau panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun masih memberikan fleksibilitas kepada responden untuk menjelaskan lebih dalam atau memberikan tanggapan yang lebih luas terkait strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Beasiswa Smart. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti bebas menambah pertanyaan yang ingin ditanyakan, asalkan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sudah terjawab.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang penting dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan peninjauan data yang terdokumentasi dalam bentuk buku, dokumen, angka tertulis, arsip, foto, jurnal, dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat diperlukan untuk memperoleh data yang relevan tentang Desa Karangpatihan. Dokumen dalam penelitian ini seperti jurnal-jurnal, buku, e-book, dan profil Desa Karangpatihan.

e. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penting dalam penelitian untuk memahami dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data dilakukan setelah data tersebut dapat terkumpul dengan persiapan yang telah direncanakan, disusun dan disajikan secara sistematis berdasarkan temuan dilapangan. Kemudian dipilih data yang penting dan dapat dibuat kesimpulan. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini menurut Miles et.al, (2014) sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data yaitu proses penting dalam analisis data kualitatif. Proses ini melibatkan pemfokusan, pemilihan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang telah diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, transkrip, dokumentasi, dan data empiris lainnya. Tujuan dari kondensasi data adalah untuk membuat data penelitian menjadi terfokus, relevan, dan kuat. Data kualitatif ini dapat diubah dengan pemilihan, ringkasan, atau penjelasan dengan menggunakan bahasa sendiri. Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti mencari data, tema, dan pola mana yang penting, dan membuang data yang tidak penting sehingga didapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi langsung terhadap pemerintah desa dan masyarakat mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas Pendidikan melalui *Beasiswa Smart*, siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan melalui *beasiswa Smart*, dan penilaian masyarakat mengenai pelayanan pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui *beasiswa Smart*.

2. Penyajian Data (data display)

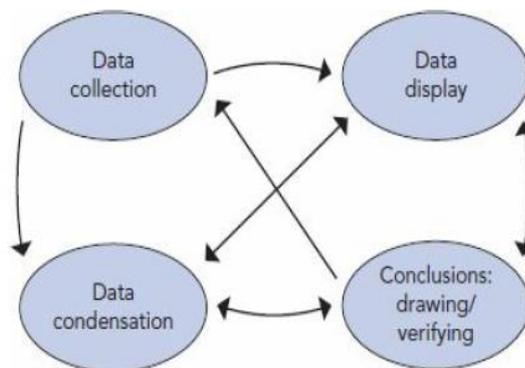
Penyajian data ini adalah hal penting dalam proses analisis data. Setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dilakukan untuk mengorganisir dan menyajikan data secara terstruktur agar mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut. Penyajian data mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami permasalahan yang terkandung dalam data penelitian dengan cara yang jelas dan komunikatif sehingga dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk bagan, grafik, deskripsi, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan data dengan tingkat kualitas pendidikan melalui *beasiswa Smart*, siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui *beasiswa Smart*, dan penilaian masyarakat mengenai pelayanan pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui *beasiswa Smart* maka selanjutnya dapat menggolongkan hasil observasi dan wawancara untuk ditunjukkan yang lebih detail.

3. Penarikan kesimpulan / Verifikasi (Drawing and Verification Conclusion)

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir didalam proses analisis data. Dalam tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah dikondensasi dan disajikan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti. Kesimpulan yang diambil bertujuan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dan merespons rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Namun, penelitian kualitatif ini rumusan masalah bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan penelitian yang dilakukan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik penelitian kualitatif yang memungkinkan adanya penemuan baru atau aspek-aspek yang tidak terduga selama proses penelitian. Setelah penyajian data terkait dengan tingkat kualitas Pendidikan melalui beasiswa *Smart*, siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui beasiswa *Smart*, dan penilaian masyarakat mengenai pelayanan pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui Beasiswa *Smart* (Miles et.al, 2014)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan analisis data dengan model interaktif (Miles et.al, 2014)



(sumber : buku Qualitative Data Abalysis oleh Miles et.al, 2014)

f. Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada tingkat kebenaran, kecocokan, atau konsistensi antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.

Menurut Norman K. Denzim (1978) keabsahan data sangat penting dalam penelitian karena mencerminkan tingkat kepercayaan yang dapat diberikan pada data tersebut. Untuk dapat meningkatkan derajat validitas data agar dapat diuji secara optimal, maka perlu dilakukan uji keabsahan. Dalam penelitian ini, menguji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keabsahan yang lebih tinggi. Triangulasi terdapat empat jenis yakni triangulasi metode, triangulasi antar penelitian, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data atau temuan penelitian. Dalam triangulasi metode, peneliti telah menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data antara lain metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

